

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai hasil dari sejumlah kebijakan perubahan iklim, Indonesia telah membuat sejumlah makalah strategis untuk menangani dampak perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada pembiayaan program perubahan iklim dan mitigasi dampaknya. Rencana strategi ini memiliki bentuk yang terdesentralisasi, dan implikasi kebijakan Indonesia seperti itu menghadirkan masalah dan peluang yang unik. Perubahan iklim memiliki arti penting ketika *Sustainable Development Goals (SDGs)* menyebutnya sebagai salah satu masalah strategis SDGs di negara berkembang pada tahun 2015. Hal ini mendukung tekad Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia untuk memberikan prioritas utama perubahan iklim, bahkan di tingkat lokal. Meskipun banyak inisiatif perubahan iklim didanai sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sistem desentralisasi tidak memungkinkan. Strategi pelengkap, pemerintah juga harus kompetitif dalam hal penanganan perubahan iklim, tidak hanya itu, pemerintah juga harus dapat membiayai dan memfasilitasi Bersama untuk petani dan kopi di Indonesia, transfer pendapatan langsung untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam rantai nilai, dan meningkatkan investasi di sektor ini melalui perpaduan pendanaan publik dan

swasta. Terakhir, mekanisme nasional dan internasional perlu dibangun di atas tata kelola *multi-stakeholder* serta pengambilan keputusan dan evaluasi yang independen

2. Petani saat ini menjual hasil panen mereka ke pasar tradisional sebagai bagian dari strategi pemasaran tradisional kopi rakyat. Setiap kelompok petani atau pengumpul biasanya memiliki jaringan pemasok yang siap menangani kopi dalam jumlah besar di pasar tradisional. Sementara kopi di pemasok, diproses dengan mesin huller yang menghilangkan kulit tanduk. Pemerintah mendukung penuh terkait mekanisme pengolahan kopi di Indonesia dan mengekspor kopi-kopi daerah wilayah Indonesia *goes to International*. Akan tetapi, terkait dengan Perubahan iklim Pemerintah bisa penulis katakan tidak sebagaimana mestinya dengan apa yang ditetapkan *International Coffee Organization (ICO)* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua peserta dalam rantai nilai kopi Indonesia, termasuk petani, ekonomi lokal, pemerintah, dan Indonesia sendiri.

B. Saran

1. Transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan tata kelola sektor. Tata kelola sektor yang efektif memerlukan pemantauan kemajuan menuju pemenuhan visi sektor dan untuk menginformasikan pembelajaran berbasis bukti. Strategi pendanaan yang terdiversifikasi dapat membiayai langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong daya saing kopi Indonesia untuk dunia. Strategi pelengkap, pemerintah juga harus kompetitif dalam hal

penanganan perubahan iklim, tidak hanya itu, pemerintah juga harus dapat membiayai dan memfasilitasi Bersama untuk petani dan kopi di Indonesia, transfer pendapatan langsung untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem dalam rantai nilai, dan meningkatkan investasi di sektor ini melalui perpaduan pendanaan publik dan swasta. Terakhir, mekanisme nasional dan internasional perlu dibangun di atas tata kelola *multi-stakeholder* serta pengambilan keputusan dan evaluasi yang independen.

2. Pemerintah haruslah lebih mendukung penuh terkait mekanisme pengolahan kopi di Indonesia. Yang dimaksud disini ialah bukan bagaimana menjual dan mengelola, tetapi mengatasi dampak dari Perubahan Iklim tersebut dimana sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan Kiblat *International Coffee Organization (ICO) Agreement 2007*. Dalam Penelitian ini terdapat ketidakselarasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Perubahan Iklim (*Climate Change*) yang ditinjau dari internasional. Alangkah lebih baiknya dibenahi dalam struktur mekanisme mengelola dan mengatasi serta mengawasi.
3. Berdasarkan tujuan dari perjanjian yang telah sepakati bersama, masalah keberlanjutan lingkungan merupakan masalah yang serius. Pemerintah wajib turun tangan langsung dalam menghadapi masalah bersama ini. Melalui program-program dan edukasi yang dapat membantu petani kecil

dan pelaku industri lainnya. Ditambah lagi pihak swasta dapat berperan dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pelaku di industri kopi. Sudah sepatutnya secara kerja sama dalam menangani permasalahan yang akan berdampak besar pada sektor perkebunan kopi.